

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengangguran merupakan kondisi dimana masyarakat yang termasuk dalam usia produktif (15-64 tahun) tetapi tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Salah satu masalah sosial dan ekonomi terpenting di Indonesia, khususnya di Jawa, adalah pengangguran. Jawa, pulau dengan penduduk terbanyak dan pusat kegiatan ekonomi, memiliki masalah yang signifikan dalam menyediakan lapangan kerja yang memadai bagi angkatan kerjanya yang terus bertambah. Menurut data Badan Pusat Statistik ((BPS), Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia , 2022). Pulau Jawa menyumbang lebih dari 56% dari total populasi Indonesia, sehingga masalah pengangguran di kawasan ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berkontribusi terhadap ketidakstabilan

Gambar 1.1 Keadaan Jumlah Penduduk dan Jumlah Pengangguran di Pulau Jawa 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia 2024

Bedasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa perbandingan jumlah pengangguran dan jumlah penduduk di Pulau Jawa tahun 2024 mencapai lebih dari 80% dari jumlah penduduk di Pulau Jawa. Yang berarti pertumbuhan penduduk tidak di ikuti dengan adanya lapangan pekerjaan yang luas.

Di Pulau Jawa, data menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di berbagai provinsi mengalami variasi dari tahun ke tahun. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap dinamika ini antara lain pertumbuhan ekonomi, kebijakan ketenagakerjaan, investasi, dan tingkat pendidikan masyarakat. Provinsi seperti DKI Jakarta dan Banten cenderung memiliki angka pengangguran lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain seperti Jawa Tengah dan DIY, yang memiliki sektor informal dan pertanian yang lebih besar.

Selain faktor ekonomi dan kebijakan ketenagakerjaan, pengangguran di provinsi-provinsi Pulau Jawa juga dipengaruhi oleh faktor pendidikan, jumlah penduduk, dan upah minimum. Tingkat pendidikan berperan penting dalam menentukan kesempatan kerja seseorang, di mana individu dengan pendidikan tinggi cenderung memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan rendah. Namun, ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan dengan kebutuhan industri (skill mismatch) masih menjadi tantangan utama dalam pasar tenaga kerja di Pulau Jawa.

Jumlah penduduk yang tinggi di Pulau Jawa juga memberikan dampak signifikan terhadap tingkat pengangguran. Dengan populasi terbesar di Indonesia, persaingan dalam memperoleh pekerjaan menjadi semakin ketat. Hal ini terutama berdampak pada kelompok usia muda yang baru memasuki dunia kerja dan sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi mereka.

Upah minimum yang diberlakukan di setiap provinsi di Pulau Jawa juga dapat mempengaruhi tingkat pengangguran. Upah minimum yang lebih tinggi dapat meningkatkan daya beli pekerja dan mendorong kesejahteraan, namun di sisi lain dapat menjadi beban bagi perusahaan, terutama sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Dalam beberapa kasus, upah minimum yang tinggi dapat menyebabkan

perusahaan mengurangi jumlah tenaga kerja atau beralih ke otomatisasi untuk mengurangi biaya produksi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat pengangguran.

Krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020 juga memberikan dampak signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Banyak sektor usaha yang mengalami penurunan aktivitas, menyebabkan lonjakan jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan. Namun, pemulihan ekonomi pasca-pandemi serta berbagai program pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja menunjukkan adanya tren penurunan tingkat pengangguran pada tahun-tahun berikutnya.

Pembangunan infrastruktur yang masif dalam satu dekade terakhir diharapkan dapat meningkatkan daya saing ekonomi dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Proyek-proyek seperti pembangunan jalan tol, kawasan industri, dan pelabuhan dapat mendukung pertumbuhan sektor manufaktur dan jasa yang berpotensi menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Namun, tantangan tetap ada dalam hal pemerataan kesempatan kerja di antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi menjadi krusial dalam menghadapi tantangan pengangguran. Program seperti Kartu Prakerja, pelatihan keterampilan berbasis industri, dan insentif bagi sektor usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan langkah-langkah yang telah diimplementasikan untuk mengurangi pengangguran. Selain itu, investasi dalam sektor infrastruktur dan industri manufaktur diharapkan dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja, khususnya di wilayah-wilayah dengan angka pengangguran tinggi.

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis pengaruh pendidikan, jumlah penduduk, dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran di Pulau Jawa yaitu Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten Daerah Khusus yaitu DKI Jakarta, dan Daerah Istimewa yaitu DI Yogyakarta selama periode 2015-2024.

Dengan menggunakan metode analisis kuantitatif, diharapkan dapat diidentifikasi faktor-faktor yang paling signifikan dalam menetapkan tingkat pengangguran di daerah ini. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan lebih dalam mengenai dinamika pasar tenaga kerja di Pulau Jawa serta memberi masukan bagi pihak pengambil kebijakan dalam menyusun strategi yang lebih efektif dalam mengurangi pengangguran di Pulau Jawa.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, Jadi penelitian ini memiliki rumusan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Apakah pendidikan, jumlah penduduk, dan upah minimum berpengaruh terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Pulau Jawa tahun 2015-2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan perumusan masalah yang sudah dibuat yaitu:

1. Menganalisis pengaruh pendidikan, jumlah penduduk dan upah minimum terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Pulau Jawa tahun 2015-2024.

1.4. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini akan membantu sejumlah populasi. Manfaat-manfaat ini meliputi hal-hal berikut:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Para akademisi dan calon akademisi yang tertarik dengan topik ini dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi. Hasil dan analisis penelitian ini dapat menawarkan perspektif baru tentang penelitian tentang jumlah penduduk, pendidikan, upah minimum, dan pengangguran terbuka.

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah dapat memanfaatkan informasi dari studi ini untuk membuat strategi ketenagakerjaan yang lebih terarah dan efisien. Dengan memahami factor-faktor yang mempengaruhi pengangguran, pemerintah dapat mengambil langkah untuk mengurangi masalah ini.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat akan memperoleh manfaat langsung dari temuan penelitian ini, khususnya para pencari kerja. Dengan pengetahuan yang lebih baik tentang factor-faktor yang mempengaruhi pengangguran, masyarakat dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan di pasar tenaga kerja.

